



**RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANJAR  
TAHUN 2023**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rencana Kerja ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan inventarisasi dari keseluruhan program dan kegiatan pada 10 (sepuluh) Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar selama satu tahun anggaran, serta sebagai pedoman rencana operasional oleh bagian-bagian di Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk semua kebijakan.

Kami menyadari Rencana Kerja ini mungkin masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati demi kesempurnaan penyajian Rencana Kerja yang akan datang kami mengharap adanya masukan dari semua pihak. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam menyusun Rencana Kerja ini sehingga dapat selesai sebagaimana mestinya.

Martapura, Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. H. Mokhamad Hilman, ST, MT  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19700328 199503 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1.    Latar Belakang.....	1
I.1.1.    Pengertian Ringkas Renja Sekretariat Daerah .....	1
I.1.2.    Proses Penyusunan Renja Sekretariat Daerah.....	1
I.1.3.    Keterkaitan Antara Renja Sekretariat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	2
I.2.    Landasan Hukum.....	3
I.2.1.    Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Sekretariat Daerah.....	3
I.2.2.    Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran .....	10
I.3.    Maksud dan Tujuan .....	12
I.3.1.    Maksud Penyusunan Renja Sekretariat Daerah .....	12
I.3.2.    Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat Daerah.....	12
I.4.    Sistematika Penulisan.....	12
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU.....	13
II.1.    Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah .....	13
II.2.    Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.....	32
II.3.    Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah .....	34
II.4.    Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	49
III.1.    Telahaan terhadap Kebijakan Nasional.....	49
III.2.    Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	51
III.3.    Program dan Kegiatan .....	52
III.3.1.    Rincian Program dan Kegiatan .....	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	67
BAB V PENUTUP .....	79

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Anggaran Tahun 2021 .....	13
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Banjar ...	16
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar sebelum adanya revisi indikator kinerja .....	33
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2022 .....	36
Tabel 3.1	Keselarasan indikator makro antara RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKPD Kabupaten Banjar .....	49
Tabel 3.3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Banjar .....	56
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Banjar .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renja SKPD .....	2
Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran .....	3

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap SKPD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun seperti yang tertuang dipasal 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Sekretariat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tahunan pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan pencapaian kinerja kegiatan pembangunan pada tahun sebelumnya, indikator kinerja output dan outcome yang kurang relevan, serta isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan rencana kerja.

#### **I.1.1. Pengertian Ringkas Renja Sekretariat Daerah**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah sebagai dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat Daerah.

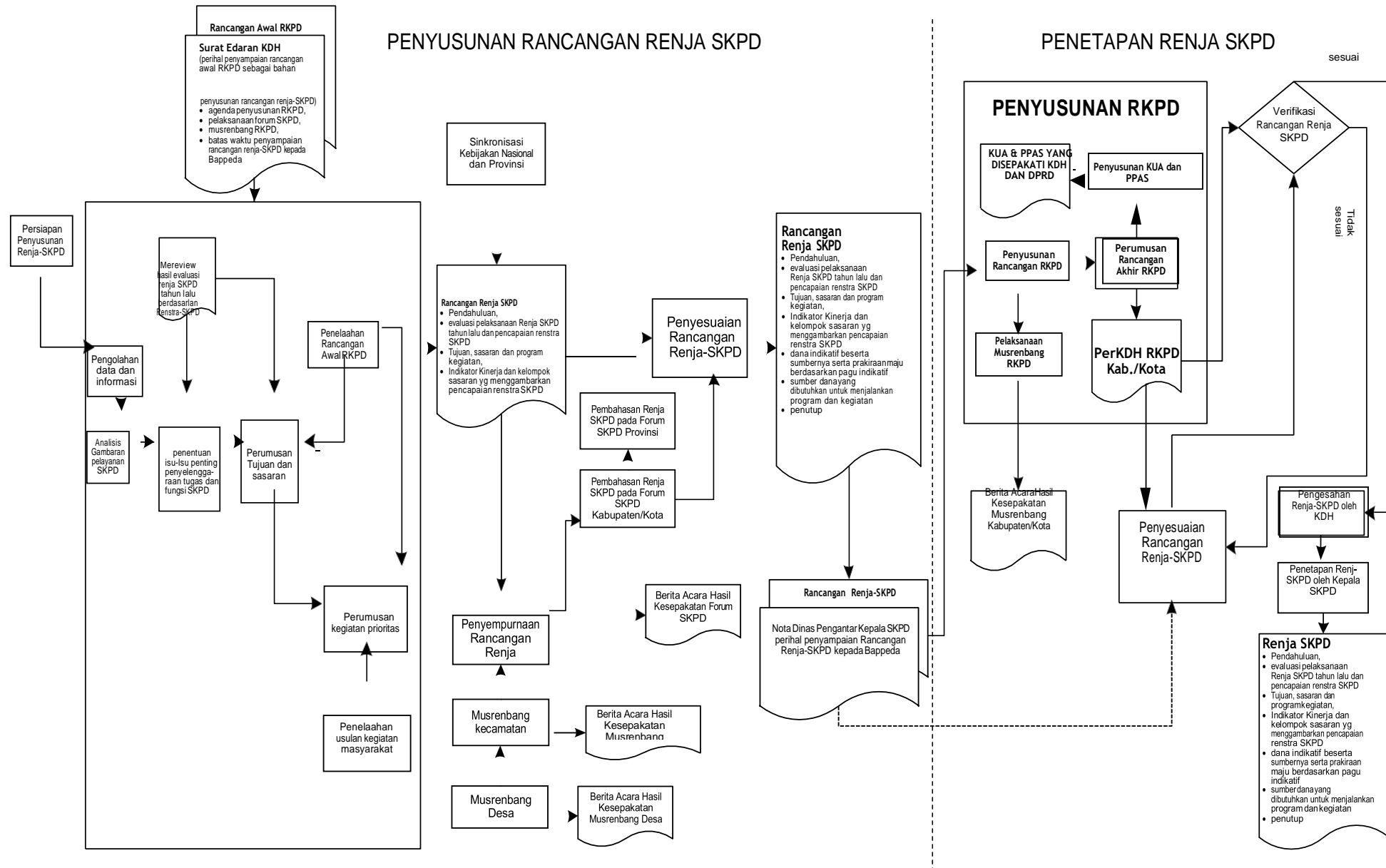
#### **I.1.2. Proses Penyusunan Renja Sekretariat Daerah**

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam Renstra Sekretariat Daerah dan Renja Sekretariat Daerah disusun berdasarkan:

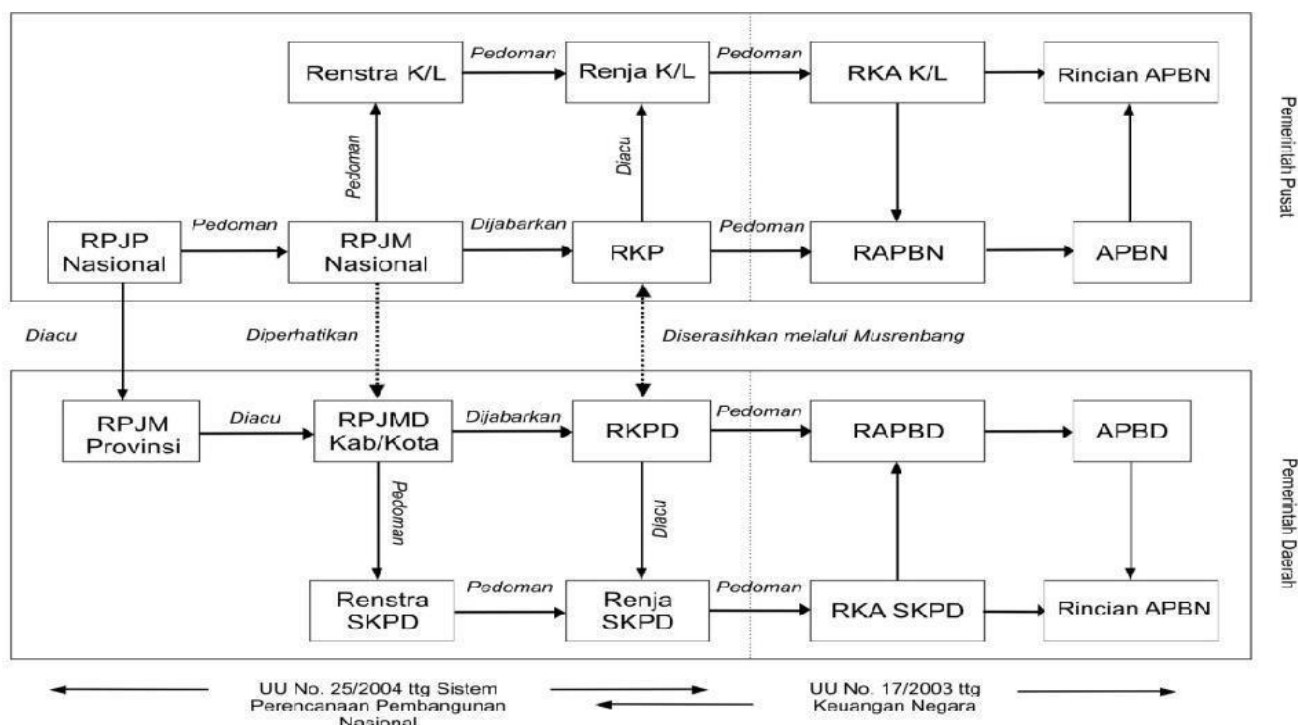
- 1) Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- 2) Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- 3) Urusan pemerintahan fungsi penunjang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

I.1.3. Keterkaitan Antara Renja Sekretariat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Gambar 1.1  
Proses Penyusunan Renja SKPD



Gambar 1.2  
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



## I.2. Landasan Hukum

### I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Sekretariat Daerah

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :
  - a) Dalam BAB Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
  - b) Dalam BAB Pembentukan Perangkat Daerah Pasal 3 huruf a disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Tipe A;
  - c) Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Asisten dan 10 Bagian.
2. Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah , selanjutnya terinci sebagai berikut:
  - (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
    - i. Sekretariat Daerah.
    - ii. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
      1. Bagian Pemerintahan terdiri dari :
        - a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
        - b. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
        - c. Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
      2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
        - a. Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
        - b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
        - c. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

3. Bagian Hukum, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perundang-Undangan;
  - b. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
  - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
- iii. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
  1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
    - b. Sub Bagian Perekonomian; dan
    - c. Sub Bagian Sumber Daya Alam.
  2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
    - b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
    - c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
  3. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - b. Sub Bagian Pengendalian Program.
- iv. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
  1. Bagian Umum, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
    - b. Sub Bagian Perlengkapan; dan
    - c. Sub Bagian Rumah Tangga.
  2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Protokol;
    - b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
    - c. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
  3. Bagian Organisasi, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Kelembagaan Analisa Jabatan;
    - b. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
    - c. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
  4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Perencanaan;
    - b. Sub Bagian Keuangan; dan
    - c. Sub Bagian Pelaporan.

(2) Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut :

- i. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- ii. Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
  1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara

dilingkungan pemerintah daerah; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Tugas dan Fungsi Asisten adalah sebagai berikut :

- i. Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
- ii. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa.
- iii. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan.

(4) Tugas dan Fungsi Bagian – Bagian adalah sebagai berikut :

i. Bagian Pemerintahan

1. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah.

2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan kerjasama dan otonomi daerah.
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan kerjasama dan otonomi daerah.
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan kerjasama dan otonomi daerah.
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan kerjasama dan otonomi daerah.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

ii. Bagian Kesejahteraan Rakyat

1. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah terkait kesejahteraan Sosial;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

iii. Bagian Hukum

1. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi.
2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
  - b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
  - c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
  - d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.Penyusunan pertimbangan dan bantuan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;

iv. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam.

2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam;
  - b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam;
  - c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian, dan sumber daya alam; dan
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah terkait ekonomi;
- v. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
1. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
  2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
    - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
    - b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
    - c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
    - d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
    - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

vi. Bagian Administrasi Pembangunan

1. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian program.
2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
  - a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian program;
  - b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian program;
  - c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian program; dan
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

vii. Bagian Umum

1. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga.
2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
  - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga;
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga; dan
  - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

viii. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

1. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan.
2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
  - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan;
  - b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan;
  - c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi pimpinan; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

ix. Bagian Organisasi

1. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.

2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

x. Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

2. Menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

### **I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran**

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja terkait dengan perencanaan dan penganggaran, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional berdampak pada penurunan pendapatan dari dana transfer, dan diperkirakan Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan;

- 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 04)
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor... Tahun... tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun... Nomor....)
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021)
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 19) Peraturan Bupati Banjar Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020;
- 20) Peraturan Bupati Banjar nomor 73 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) SETDA;
- 21) Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah;
- 22) Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022
- 23) Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021
- 24) Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

- 25) Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- 26) Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

#### **I.3.1. Maksud Penyusunan Renja Sekretariat Daerah**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah :

- 1) Sebagai salah satu landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
- 2) Menjabarkan rencana strategis Kabupaten Banjar dalam rencana strategis Sekretariat Daerah jangka pendek (1 Tahun);
- 3) Merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan merupakan tolak ukur penilaian kinerja bagian -bagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023 sebagai wujud dari kinerja Sekretariat Daerah.

#### **I.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat Daerah**

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah :

- 1) Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
- 2) Untuk menetapkan arah kerja serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023;
- 3) Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Sekretariat Daerah 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan
- 2) Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu
  - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
  - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
  - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
  - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 3) Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
  - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
  - 3.3. Program dan Kegiatan
- 4) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- 5) Penutup

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU**

**II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah**

Penyusunan rencana kerja khususnya program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan dan realisasi. Pada penyusunan rencana kerja tahun 2023 tidak terlepas dari evaluasi kinerja tahun 2022 (sedang berjalan) dan evaluasi kinerja Tahun 2021, evaluasi ini dijelaskan mengenai pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan yang tertuang dalam program dan kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun Anggaran yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 adalah Sebesar Rp. 38.994.534.505 dengan realisasi sebesar Rp.35.129.854.702 atau (90,09%) tersaji dalam tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	capaian %	Target	Realisasi	Realisasi %
						(Rp)	(Rp)	
1	Pemberdayaan lembaga keagamaan	Persentase peningkatan andana zakat yang tersalurkan	11,13	507	4555	555.520.000	403.329.232	72,60
	Meningkatnya pengelolaan lembaga zakat	Jumlah ZIS yang terkumpul	699.840.000	1.975.238.029	282	555.520.000	403.329.232	72,60
2	Pelestarian budaya keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	100	100	100	3.648.157.400	3.335.489.248	91,43
	Meningkatnya kegiatan keagamaan yang diperingati	Persentase kegiatan keagamaan yang diperingati	100	100	100	3.648.157.400	3.335.489.248	91,43
3	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase SKPD yang menginput RUP ke aplikasi SIRUP	100	100	100	563.418.100	410.619.151	72,88
	Meningkatnya paket pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu	92	100	109	563.418.100	410.619.151	72,88
4	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai/Skor EKPPD	109,59	35069	109,59	395.111.700	379.173.524	95,97

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	capaian %	Target	Realisasi	Realisasi %
						(Rp)	(Rp)	
	Meningkatnya Persentase keterisian data Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan rata-rata ikm kecamatan	Persentase keterisian data Indikator Kinerja Kunci (IKK)	100	100	100	395.111.700	379.173.524	95,97
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,1	83,43	101,62	789.291.000	720.583.052	91,29
	Meningkatnya Prosentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi birokrasi	Prosentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi birokrasi	100	100	100	789.291.000	720.583.052	91,29
BELANJA LANGSUNG UTAMA						5.951.498.200	5.249.194.207	88,20

Sumber : Bagian-bagian Sekretariat Daerah

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 88,20% telah dapat memenuhi tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan mengenai realisasi program kegiatan, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
  - a. Pelestarian budaya keagamaan
  - b. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah
  - c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- 2) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD, adalah sebagai berikut:
  - a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada Sekretariat Daerah.
  - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan SKPD.
  - c. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
  - d. Pada perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.
  - e. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen

perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas adalah dengan melakukan koordinasi dari pihak-pihak terkait mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target yang diharapkan.

Pada tahun 2022 Sekretariat Daerah melaksanakan 3 Program, 19 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan. Sedangkan pada tahun 2023 Sekretariat Daerah melaksanakan 3 Program, 19 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan. Pencapaian kinerja tahun 2022 dapat diketahui guna mengembangkan organisasi ke depan dengan cara dilakukan pengukuran kinerja pada kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja selain sebagai upaya pengembangan organisasi kedepan juga sebagai sistem koreksi performa masing– masing bagian di lingkup Sekretariat Daerah. Sedangkan pencapaian kinerja tahun 2022 performa dari masing–masing bagian tidak dapat diperoleh secara spesifik karena pengukuran kinerja Sekretariat Daerah masih berjalan. Indikator kinerja dari kegiatan dijelaskan berdasarkan masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*) sebagaimana tertuang pada Tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Banjar

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2026(akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Tahun 2020(n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021(tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021(n-2)	Tingkat realisasi Tahun 2021(%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022(tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	TAHUN 2021 dan 2020									
4	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	-	-	-
4	01 01 2 01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Sekretariat Daerah</b>	-	<b>82,27</b>	80,9	<b>82,27</b>	110	-	-
4	01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	-	4	4	4	85	-	-
			Jumlah dokumen anggaran dan belanja yang diverifikasi	-	4	4	4		-	-
4	01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja Setda sesuai ketentuan	-	4	4	7	76	-	-
4	01 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja	-	4	4	5	285	-	-
4	01 01 2 02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah ASN Setda yang mendapat pelayanan gaji tunjangan dan tambahan penghasilan</b>	-	-		25	-	-	-
			Persentase pelayanan penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlayani	-	100	<b>100</b>	125		-	-
4	01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan	-	0	120	120	18	-	-
4	01 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Aturan Yang Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel	-	19	32	23	162	-	-
4	01 01 2 05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	-	-	25	60	66	-	-

4	01	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	-	160	80	160	66	-	-	-
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-	-	-	-	-
4	01	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran</b>	-	100	100	125	17	-	-	-
4	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	12	12	15	123	-	-	-
4	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	12	12	15	109	-	-	-
4	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	-	12	12	15	46	-	-	-
4	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	11	11	14	3	-	-	-
4	01	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran</b>	-	-	100	25	19	-	-	-
4	01	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	-	0	2	-	-	-	-	-
						Pengadaan Kendaraan dinas Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Aset Meubuler yang tercatat	-	12	12	15	157	-	-	-
4	01	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran</b>	-	100	25	125	97	-	-	-
4	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang masuk dan keluar	-	12	12	15	531	-	-	-
4	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah gedung yang Terlayani Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon	-	6	12	12	120	-	-	-
4	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	-	12	12	15	84	-	-	-
4	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan jasa Kebersihan Kantor	-	12	12	15	76	-	-	-
							Pelayanan Event Hari-Hari Besar yang Difasilitasi	-	100	90	125		-	-	-

4	01	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran</b>	-	100	25	125	82	-	-	-
4	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Mobil Jabatan KDH/WKDH	-	4	4	4	38	-	-	-
4	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Layanan Perizinan Operasional Kendaraan Bermotor	-	69	115	69	190	-	-	-
							Jumlah Pelayanan Operasional Kendaraan Bermotor	-	116	115	116		-	-	-
4	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	0	12	3	5	-	-	-
4	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Gedung Kantor	-	12	12	15	89	-	-	-
4	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	12	12	15	20	-	-	-
4	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	-	12	12	15	31	-	-	-
4	01	01	2	11		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran</b>	-	100	100	125	37	-	-	-
4	01	01	2	11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Gaji & Tunjangan Kepala Daerah/ Wakil	-	-	12	3	21	-	-	-
4	01	01	2	11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	-	26	14	40	141	-	-	-
							Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu KDH/WKDH	-	14	14	28		-	-	-
4	01	01	2	11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelayanan Pemeliharaan Jaminan Kesehatan KHD/WKDH	-	12	12	15	12	-	-	-
4	01	01	2	11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Operasional KDH/WKDH	-	0	12	3	25	-	-	-
4	01	01	2	12		<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>		-	-	100	25	14	-	-	-
4	01	01	2	12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Rumah Jabatan KDH/WKDH	-	12	12	15	84	-	-	-
4	01	01	2	12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Bupati	-	-	13	3	10	-	-	-
4	01	01	2	12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	-	-	90	25	15	-	-	-
							Tersedianya makanan dan minuman	-	-	12	3		-	-	-

4	01	01	2	13		<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Terpenuhiya Layanan Administrasi Perkantoran</b>	-	100	100	125	41	-	-	-
4	01	01	2	13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen/laporan Evaluasi kelembagaan yang telah disusun	-	3	1	3	35	-	-	-
							Jumlah Dokumen Penataan Sumber Daya Aparatur	-	4	1	4		-	-	-
4	01	01	2	13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik yang dievaluasi	-	3	2	4	126	-	-	-
4	01	01	2	13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Reformasi Birokrasi	-	0	1	-	8	-	-	-
							Laporan hasil koordinasi	-	1	4	1		-	-	-
4	01	01	2	14		<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Terpenuhiya Layanan Administrasi Perkantoran</b>	-	<b>100</b>	100	125	105	-	-	-
4	01	01	2	14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Hari-hari Besar Nasional dan hari jadi yang diselenggarakan	-	0	10	-	3	-	-	-
							Jumlah Kegiatan Yang mendapat Pelayanan Keprotokolan	-	315	330	465		-	-	-
							Jumlah Pelayanan perjalanan dinas KDH/WKDH yang dilayani	-	12	1	15		-	-	-
4	01	01	2	14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Naskah Sambutan/Pidato	-	339	350	410	296	-	-	-
							Jumlah Perjalanan Setda yang dilayani	-	12	12	15		-	-	-
4	01	01	2	14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi pimpinan	-	0	440	175	20	-	-	-
4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		-	-	-	-	34	-	-	-
4	01	02	2	01		Administrasi Tata Pemerintahan	<b>Persentase Keterisian Data Indikator Kinerja Kunci (IKK)</b>	-	100	-	200	104	-	-	-

							Rata-Rata IKM Kecamatan	-	85	-	85		-	-	-
							Persentase Permasalahan Segmen Batas Wilayah Yang Diselesaikan	-		-	-		-	-	-
4	01	02	2	01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Lingkup Urusan Pemerintahan Yang disusun	-	1	1	1	136	-	-	-
4	01	02	2	01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah item rupa bumi (toponomi) yang diverifikasi	-	1	1	1	105	-	-	-
							Jumlah kesepakatan segmen batas wilayah yang dihasilkan dalam penetapan batas wilayah kecamatan dan kabupaten	-	3	3	4		-	-	-
							Jumlah Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	2 Laporan	-	2	4			-	-
							Jumlah laporan monev batas wilayah	4 Laporan	-	4	5			-	-
							Jumlah pembangunan patok batas wilayah	10 patok	-	10	5			-	-
							Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Kelurahan	1 Laporan	-	1	1			-	-
4	01	02	2	01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen LPPD dan EKPPD yang diverifikasi	-	2	2	3	87	-	-	-
4	01	02	2	02		<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Jumlah ZIS yang terkumpul	-	<b>2.033.314.132</b>	<b>699.840.000</b>	2512641783	27	-	-	-
							Persentase Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi	-	100%	100%	-		-	-	-
4	01	02	2	02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Keagamaan & Hari-hari Besar Keagamaan	-	3	8	4	37	-	-	-

4	01	02	2	02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Lingkup Urusan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Disusun	-	3	7	4	5,07	-	-	-
							Jumlah laporan monev bantuan hibah	-	1	2	1		-	-	
							Jumlah UPZ yang dibina	-	34	34	68		-	-	
4	01	02	2	02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Ulama & Toko Masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan	-	45	60	105	11	-	-	-
4	01	02	2	03		<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	Persentase peraturan yang disahkan	-	100	100	125	73	-	-	-
							Persentase Dokumen Peraturan Perundang-undangan Yang Dipublikasikan	-	100	100	125		-	-	
							Persentase Terfasilitasi Permasalahan Hukum Yang Tertangani	-	100	100	125		-	-	
4	01	02	2	03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah	-	1	1	2	61	-	-	-
							Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Berbentuk Peraturan dan Penetapan	-	501	550	759		-	-	
4	01	02	2	03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Laporan asistensi kontrak drafting kesepakatan bersama atau perjanjian	-	12	15	37	109	-	-	-
							Jumlah Pemberian bantuan hukum dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara yang dihadapi Pemerintah Daerah	-	5	5	7		-	-	
							Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	-	5	4	5		-	-	-
4	01	02	2	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Dokumentasi Produk Hukum Daerah	-	501	500	642	24	-	-	-

						Jumlah Media Publikasi	-	1	1	2		-	-		
4	01	02	2	04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	<b>Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Terkait Yang ditindaklanjuti</b>	-	100	-	100	85	-	-	-
4	01	02	2	04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi dan koordinasi kerjasama daerah	-	10	10	35	13	-	-	-
							Jumlah laporan monev kerjasama antar daerah	-	4	1	4		-	-	
4	01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		-	-	100	-	12	-	-	-
4	01	03	2	01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<b>Persentase BUMD yang sehat</b>	-	100	100	125	53	-	-	-
4	01	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD dan BLUD yang difasilitasi dan dievaluasi	-	13	13	19	29	-	-	-
4	01	03	2	01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan TPID yang disusun	-	4	4	5	85	-	-	-
4	01	03	2	02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	<b>Persentase Administrasi Pembangunan yang dibuat</b>	-	-	100%	25	12	-	-	-
4	01	03	2	02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Penyusunan Kegiatan Pembangunan	-	-	1	-	2	-	-	-
4	01	03	2	02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian Pembangunan	-	-	4	1	1	-	-	-
4	01	03	2	02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	-	-	4	1	16	-	-	-
4	01	03	2	03		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase paket Pengadaan barang dan Jasa yang tepat waktu</b>	-	-	92	82,62	125	-	-	-
4	01	03	2	03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Kontrak yang sesuai Ketentuan	-	4	4	5	104	-	-	-
							Jumlah Laporan Paket lelang yang disusun sesuai ketentuan	-	3	4	4		-	-	
4	01	03	2	03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah SKPD yang menyampaikan dan mengumumkan RUP Tepat Waktu	-	50	54	87	114	-	-	-

4	01	03	2	03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan PBJ yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	-	55	54	67	237	-	-	-
4	01	03	2	04		<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase kebijakan lingkup urusan perekonomian yang terlaksana</b>	-	-	100	25	14	-	-	-
4	01	03	2	04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan Kegiatan pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam	-	-	2	-	5	-	-	-
4	01	03	2	04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Pemantauan dan evaluasi energi dan air	-	-	2	-	19	-	-	-
						TAHUN 2022									
4	01	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Nilai IKM Kabupaten Banjar Nilai SAKIP Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 Nilai 88,31 Nilai 80,05 Nilai 100 persen	-	-	-	-	80 persen 84 Nilai 70 Nilai 100 persen	-	-
4	01	01	2		01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP Setda Persentase Bagian yang Berkinerja Baik Persentase Lapopran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Akuntabel Persentase Perencanaan dan Penganggaran yang Efektif dan Efesien	82,5 Nilai 100 persen	-	-	-	-	81,75 Nilai 100 persen 100 persen 100 persen	-	-
4	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	-	-	-	-	14 Dokumen	6	49,99
4	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	-	-	-	-	7 Laporan	4	49,99
4	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 Laporan	-	-	-	-	29 Laporan	13	49,99

4	01	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang Tertib Administrasi	100 persen	-	-	-	-	100 persen	-	-
4	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 orang/bulan	-	-	-	-	117 orang/bulan	117	49,99
4	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	5	49,99
4	01	01	2	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlayani	100 persen 100 persen	-	-	-	-	85 persen	-	-
4	01	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 orang	-	-	-	-	80 orang	-	49,99
4	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang	-	-	-	-	20 orang		
4	01	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlayani	100 persen	-	-	-	-	100 persen	-	-
4	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	-	-	-	-	6 paket	4	49,99
4	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 paket	-	-	-	-	28 paket	13	49,99
4	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	1	49,99
4	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	1	49,99

4	01	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 persen	-	-	-	-	100 persen	-	-
4	01	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1	49,99
4	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	-	-	-	-	5 unit	1	49,99
4	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	7 Paket	3	49,99
4	01	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 persen	-	-	-	-	100 persen	-	-
4	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	1	49,99
4	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	6	49,99
4	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	1	49,99
4	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	2	49,99
4	01	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	100 persen	-	-	-	-	100 persen	-	-
4	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 unit	-	-	-	-	38 unit	26	49,99
4	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121 unit	-	-	-	-	120 unit	68	49,99

4	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	-	-	-	-	20 unit	6	49,99
4	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	-	-	-	-	6 unit	2	49,99
4	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	-	-	-	-	6 unit	3	49,99
4	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	250 unit	-	-	-	-	264 unit	111	49,99
4	01	01	2	11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyediaan dan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang sesuai ketentuan Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH yang sesuai ketentuan Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	-	-	-	-	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	-	-
4	01	01	2	11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 orang/bulan	-	-	-	-	24 orang/bulan	12	49,99
4	01	01	2	11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 paket	-	-	-	-	9 paket	9	49,99

4	01	01	2	11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 orang	-	-	-	-	7 orang	6	49,99
4	01	01	2	11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 orang/bulan	-	-	-	-	24 orang/bulan	6	49,99
4	01	01	2	12		<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan KDH yang Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan WKDH yang Sesuai Ketentuan	100 persen 100 persen 100 persen	-	-	-	-	100 persen 100 persen 100 persen	-	-
4	01	01	2	12	011	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 paket	-	-	-	-	7 paket	7	49,99
4	01	01	2	12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 paket	-	-	-	-	6 paket	6	49,99
4	01	01	2	12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 paket	-	-	-	-	17 paket	17	49,99
4	01	01	2	13		Penataan Organisasi	Nilai IKM Kabupaten Banjar Nilai SAKIP	84 Nilai 70 Nilai	-	-	-	-	84 Nilai 70 Nilai	-	-
4	01	01	2	13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	9Dokumen	-	-	-	-	9Dokumen	4 Dokumen	49,99
4	01	01	2	13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 Laporan	-	-	-	-	6 Laporan	2	49,99
4	01	01	2	13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7 Dokumen	-	-	-	-	7 Dokumen	4	49,99
4	01	01	2	14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan kepada	85 persen	-	-	-	-	85 persen	-	-



						Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB									
4	01	02	2	02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	1	49,99
4	01	02	2	03		<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	-	-	-	-	100 persen	-	-
4	01	02	2	03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550 Dokumen	-	-	-	-	550 Dokumen	433	49,99
4	01	02	2	03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	-	-	-	-	5 Kasus	5	49,99
4	01	02	2	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	-	-	-	-	500 Dokumen	375	49,99
4	01	02	2	04		<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	-	-	-	-	100 persen	-	-
4	01	02	2	04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	0	0
4	01	03				<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	100 persen	-	-	-	-	100 persen	-	-
4	01	03	2	01		<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan	100 persen	-	-	-	-	100 persen	-	-

							Perekonomian Dan Pembangunan										
4	01	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	2			33,33
4	01	03	2	01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	1			33,33
4	01	03	2	02		<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan	100 persen	-	-	-	-	100 persen				
4	01	03	2	02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	2			49,99
4	01	03	2	02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	2			49,99
4	01	03	2	02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	1			49,99
4	01	03	2	03		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	40 skor/nilai	-	-	-	-	40 skor/nilai				
4	01	03	2	03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	2			49,99
4	01	03	2	03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	2			49,99
4	01	03	2	03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	105 orang	-	-	-	-	68 orang	14			49,99
4	01	03	2	04		<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	100 persen	-	-	-	-	100 persen				
4	01	03	2	04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM,	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	0			49,99

						Penanaman Modal, Tenaga Kerja									
4	01	03	2	04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	94 Dokumen	-	-	-	-	94 Dokumen	47	49,99

**Catatan:**

Tabel antara Tahun 2020 dan 2022 dipisah, dikarenakan satuan pada indicator yang berbeda. Sehingga pada kolom 10 dan 11 untuk tahun 2020 dan 2021 program dan kegiatan tidak dapat diisikan realisasi dan capaiannya dikarenakan adanya perbedaan satuan pada indicator untuk tahun anggaran 2022.

## **II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah**

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan cara melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah dalam rangka membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta mengkoordinasikan, memfasilitasi dan sinkronisasi dengan dinas dan lembaga teknis daerah. Tujuan Rencana Sekretariat Daerah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah Terselenggaranya Reformasi Dalam Perencanaan, Penganggaran Dan Akuntabilitas Kinerja.

Penyusunan Rencana Kerja tahun anggaran 2023 sampai dengan tahun berakhirnya renstra disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (tabel 2.4).

Untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

- 1) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi bidang hukum, pemerintahan, kesejahteraan sosial, pembangunan, perekonomian, layanan pengadaan, hubungan kemasyarakatan, organisasi, serta umum;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pada lingkup Sekretariat Daerah;
- 3) Melakukan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi dengan seluruh SKPD;
- 4) Pelayanan teknis administratif Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan seluruh SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Banjar.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar**

No	Indikator Program	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat			Tidak Menjadi Indikator	100%	100%	100%	Tidak Menjadi Indikator	NA	100%	100%	
2	Nilai LPPD			Tidak Menjadi Indikator	3,1 Nilai	3,1250 Nilai	3,15 Nilai	Tidak Menjadi Indikator	NA	3,1250 Nilai	3,15 Nilai	
3	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan			Tidak Menjadi Indikator	100%	100%	100%	Tidak Menjadi Indikator	NA	100%	100%	
4	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah			Tidak Menjadi Indikator	40 Skor/Nilai	50 Skor/Nilai	60 Skor/Nilai	Tidak Menjadi Indikator	NA	50 Skor/Nilai	60 Skor/Nilai	
5	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum			Tidak Menjadi Indikator	100%	100%	100%	Tidak Menjadi Indikator	NA	100%	100%	
6	Nilai SAKIP			Tidak Menjadi Indikator	70 Nilai	72,5 Nilai	75 Nilai	Tidak Menjadi Indikator	NA	72,5 Nilai	75 Nilai	
7	Nilai IKM Kab. Banjar			Tidak Menjadi Indikator	84 Nilai	85 Nilai	86 Nilai	Tidak Menjadi Indikator	NA	85 Nilai	86 Nilai	
8	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)			Tidak Menjadi Indikator	80 Nilai	85 Nilai	90 Nilai	Tidak Menjadi Indikator	NA	85 Nilai	90 Nilai	

## II.1. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Permasalahan yang masih ada di tingkat pelayanan SKPD yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Sulit membangun kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah melalui UPZ yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur permohonan bantuan sosial dan hibah;
- 3) Dalam pembinaan BUMD, belum terbitnya Peraturan Menteri yang mengatur secara teknis tentang pengelolaan BUMD;
- 4) Belum optimal Perangkat Daerah dalam pengajuan lelang dalam hal ini kelengkapan dokumen yang sesuai SIRUP;
- 5) Masih kurang jumlah SDM fungsional PBJ dalam melaksanakan lelang tepat waktu;
- 6) Pengelolaan Guest House Sultan Sulaiman yang belum profesional;
- 7) Dalam pembahasan Peraturan Daerah melibatkan pihak terkait yaitu Perangkat Daerah pemrakarsa dan DPRD, sehingga tidak bisa maksimal untuk mengejar target;
- 8) Masih terdapat indikator SPM yang memang tidak bisa dilaksanakan di daerah namun tetap menjadi perhitungan dalam capaian indikator SPM;
- 9) Masih kurang tanggapnya Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik dalam melaporkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat;
- 10) Kurangnya pengetahuan tentang inovasi pelayanan untuk menunjang kegiatan-kegiatan di yang dilaksanakan agar lebih efektif dan efisien;
- 11) Dalam proses Evaluasi Pembentukan UPTD di Lingkup Kabupaten Banjar yang menjadi permasalahan adalah adanya fungsi UPTD yang sudah didefinisikan dalam peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah tetapi sudah sinkron dan tidak mengakomodir sesuai Uraian Tugas UPTD;
- 12) Masih kurangnya pemahaman dari SKPD mengenai nama jabatan yang sesuai dengan tugas jabatan dan pemilahan nama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 13) Belum ada kesepakatan pemilihan SKPD atau ASN yang dijadikan sebagai role model dan nilai dasar yang disepakati untuk diterapkan;
- 14) Kurang maksimalnya kegiatan asistensi yang dilaksanakan sehingga draf Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang harus direvisi atau diperbaiki kembali oleh Bagian Organisasi;
- 15) Banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait reformasi birokrasi untuk perubahan di daerah agar menjadi lebih baik;
- 16) Keberadaan TTKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Daerah, belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan oleh SKPD yang akan melaksanakan kerjasama;
- 17) Belum maksimalnya penegasan batas antar kabupaten (Banjar - Tanah Laut dan

- Banjar – Banjarbaru), antar kecamatan dan antar desa/kelurahan;
- 18) Ada beberapa pilar batas yang bergeser, rusak dan hilang sehingga sulit untuk menentukan batas secara akurat.

Dari berbagai isu penting tersebut, Sekretariat Daerah berusaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dimana tugas pokok Sekretariat Daerah adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebagai SKPD Pengkoordinasian atas Dinas-Dinas dan Badan-Badan Pelaksananya.

## **II.2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 berkaitan dengan program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Proses review dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan . Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2023

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Banjar	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Nilai IKM Kabupaten Banjar Nilai SAKIP Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	85 Persen 85 Nilai 72.5 Nilai 100 Persen	17,995,328,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Banjar	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	85 Persen	Rp. 34.053.985.266,00	
2	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Banjar	Nilai SAKIP Setda Persentase Bagian yang Berkinerja Baik Persentase Lapopran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Akuntabel Persentase Perencanaan dan Penganggaran yang Efektif dan Efesien	81.75 Nilai 100 Persen 100 Persen 100 Persen	203,580,000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Banjar	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	85 Persen	Rp. 202.894.800,00	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	106,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	Rp. 105.814.800,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Laporan	48,555,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Laporan	Rp. 48.555.000,00	

			SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 Laporan	48,525,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 Laporan	Rp. 48.525.000,00	
6	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Banjar	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang Tertib Administrasi	100 Persen	254,784,000	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Banjar	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang Tertib Administrasi	100 Persen	Rp. 16.307.640.224	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang	Rp. 16.052.856.224	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	254,784,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp. 254.784.000	
9	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Banjar	<b>Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlayani</b>	100 Persen 100 Persen	167,972,000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Banjar	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	85 Persen	Rp. 168.761.000	
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	17.972.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	Rp.18.761.000	

11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	150,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Rp. 150.000.000	
12	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Banjar	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlayani	100 Persen	2,937,042,348	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Banjar	<b>Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum</b>	100 Persen	Rp. 2.936.917.875	
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	33.942.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 33.942.000	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	612,278,614	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Rp. 612.165.875	
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	30,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Rp. 30.000.000	
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2,260,821,734	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Rp. 2.260.810.000	
17	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Banjar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 Persen	85,900,000	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Banjar	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	100 Persen	Rp. 85.212.000	
18	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Banjar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Banjar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp.	
19	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Kab. Banjar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Kab. Banjar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Rp.	

20	Pengadaan Mebel	Kab. Banjar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	85,900,000	Pengadaan Mebel	Kab. Banjar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	Rp. 85.212.000	
21	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 Persen	5,220,189,296	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banjar	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	85 Persen	Rp. 5.172.769.196	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	43,040,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Rp. 43.039.900	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,109,999,296	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 1.109.999.926	
24	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	207,250,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Rp. 207.250.000	
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3,859,900,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 3.812.480.000	
26	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Banjar	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	100 Persen	3,736,950,000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Banjar	<b>Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)</b>	85 Persen	Rp. 3.733.718.725	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Banjar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	38 Unit	1,038,930,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Banjar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	Rp. 1.037.120.000	

28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121 Unit	1,210,400,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banjar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	109 Unit	Rp. 1.209.160.000	
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	40,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	Rp. 40.000.000	
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	544,300,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Rp. 544.174.725	
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	480,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Rp. 479.964.000	
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	250 Unit	423,320,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banjar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	250 Unit	Rp. 423.300.000	
33	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Kab. Banjar	Persentase penyediaan dan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang sesuai ketentuan Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH yang sesuai ketentuan Persentase Penyediaan dan Penatausahaan	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	958,949,556	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Kab. Banjar	<b>Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)</b>	85 Persen	Rp. 963.174.556	

			Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan								
34	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	170.474.556	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Per Bulan	Rp. 170.474.556	
35	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket	98.475.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket	Rp. 102.700.000	
36	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang	90.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7 Orang	Rp. 90.000.000	
37	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	600.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Per Bulan	Rp. 600.000.000	
38	<b>Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	Kab. Banjar	Persentase Pelayanan Kerumahtangaan KDH yang Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah yang Sesuai Ketentuan Persentase Pelayanan Kerumahtangaan WKDH yang Sesuai Ketentuan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	1,900,925,500	<b>Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	Kab. Banjar	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	85 Persen	Rp. 1.953.895.190	

39	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	604,996,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	Rp. 655.880.250	
40	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	361,344,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	Rp. 361.333.000	
41	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 Paket	934,585,500	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17 Paket	Rp. 936.681.940	
42	<b>Penataan Organisasi</b>	Kab. Banjar	Persentase PD Pengelolaan RB Bernilai Baik Persentase PD SAKIP Bernilai Baik Persentase PD yang Pelayanan Publik Bernilai Baik Persentase Penataan Organisasi Persentase Pengelolaan Tatalaksana Tingkat Efisiensi Unit dan Prestasi Kerja Unit Kabupaten Banjar Bernilai Baik	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 1.3 Nilai	870,574,200	Penataan Organisasi	Kab. Banjar	Nilai IKM Kabupaten Banjar Nilai SAKIP	85 Nilai 72.5 Nilai	Rp. 870.574.200	
43	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	9 Dokumen	132,150,000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	Rp. 341.090.000	
44	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 Laporan	164,860,000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 Laporan	Rp. 208.241.200	

45	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7 Dokumen	573,564,200	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7 Dokumen	Rp. 321.243.000	
46	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Kab. Banjar	Persentase Fasilitasi Keprotokolan kepada Pimpinan Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	1,658,461,100	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Kab. Banjar	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	85 Persen	Rp. 1.658.427.500,00	
47	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	1,395,023,000	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	Rp.1.395.000.000,00	
48	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	130,544,100	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Rp. 130.541.500,00	
49	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	132,894,000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	Rp. 132.886.000,00	
50	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Kab. Banjar	Nilai LPPD Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	3.1110 Nilai 100 Persen	2,156,254,100	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Kab. Banjar	<b>Nilai LPPD</b>	3.1110 Nilai	Rp. 2.155.453.980,00	
51	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	Kab. Banjar	Persentase Fasilitasi, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Persentase Terselenggaranya Administrasi	100 Persen 100 Persen 100 Persen	434,746,000	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	Kab. Banjar	Nilai LPPD	3.1110 Nilai	Rp. 434.747.000,00	

			Pemerintahan								
52	<b>Penataan Administrasi Pemerintahan</b>	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	53,080,500	<b>Penataan Administrasi Pemerintahan</b>	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	Rp. 69.225.500,00	
53	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	200,276,500	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	Rp. 184.132.500,00	
54	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	181,389,000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	Rp. 181.389.000,00	
55	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Kab. Banjar	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Sesuai Ketentuan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Bina Mental dan Spiritual Keagamaan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Sesuai Ketentuan	100 Persen 100 Persen 100 Persen	1,380,591,800	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Kab. Banjar	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	Rp. 1.380.579.780,00	
56	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	1,195,875,000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen	Rp. 1.195.858.000,00	
57	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan,	3 Dokumen	94,900,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan	3 Dokumen	Rp. 94.905.000,00	

			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB					Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			
58	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	89,816,800	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	Rp. 89.816.780,00	
59	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	Kab. Banjar	Persentase Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Persentase Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	100 Persen 100 Persen 100 Persen	315,357,500	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	Kab. Banjar	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	Rp. 314.568.400,00	
60	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550 Dokumen	91,479,400	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Banjar	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550 Dokumen	Rp. 105.869.800,00	

61	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Banjar	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	187,684,500	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Banjar	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	Rp. 171.905.000,00
62	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Banjar	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	36,193,600	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Banjar	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen	Rp. 36.793.600,00
63	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	Kab. Banjar	Persentase Kerjasama Daerah Dengan Pihak Terkait Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	25.558.800	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	Kab. Banjar	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	Rp. 25.558.800,00
64	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	25,558,800	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	Rp. 25.558.800,00
65	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Kab. Banjar</b>	<b>Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan</b>	50 Skor/Nilai 100 Persen	1,045,612,900	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Kab. Banjar	<b>Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan</b>	100 Persen	Rp. 1.040.611.799,00
66	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Kab. Banjar	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Kebijakan lingkup urusan perekonomian	100 Persen	356,578,200	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Kab. Banjar	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	100 Persen	Rp. 351.578.200,00
67	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	13 Dokumen	315,684,500	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen	Rp. 310.684.500,00

68	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	40,893,700	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	Rp. 40.893.700,00	
69	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Kab. Banjar	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan	100 Persen	120,132,000	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Kab. Banjar	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	100 Persen	Rp. 120.130.899,00	
70	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	43,655,000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	Rp. 43.654.300,00	
71	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	38,745,600	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	Rp. 38.745.200,00	
72	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	37,731,400	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Banjar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	Rp. 37.731.399,00	
73	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Kab. Banjar</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kriteria Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik</b>	40 Persen	529,310,700	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Kab. Banjar	<b>Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</b>	50 Skor/Nilai	Rp. 529.310.700,00	
74	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen	129,242,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen	Rp. 129.242.000,00	
75	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen	268,033,700	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen	Rp. 268.033.700,00	
76	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	68 Orang	132,035,000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	68 Orang	Rp.132.035.000,00	

77	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	Kab. Banjar	Persentase Pemantauan kebijakan Sumber daya alam	98 Laporan	39,592,000	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	Kab. Banjar	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	100 Persen	Rp. 39.592.000,00	
78	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	14,933,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	Rp. 14.933.000,00	
79	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	96 Dokumen	24,659,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Banjar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	94 Dokumen	Rp. 24.659.000,00	

Sumber data : 1. Rancangan Awal diambil dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pada aplikasi SIPD tanggal 10 Juni 2022  
2. Hasil Analisis Kebutuhan di dapat dari Inputan SIPD tanggal 04 Juli 2022

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kab. Banjar tahun 2023 merupakan tahun kedua periode RPJMD tahun 2021-2026. RKPD disusun untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang sudah berjalan dan upaya menghadapi isu yang berkembang di daerah serta memperhatikan rencana kerja pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Tema dan prioritas pembangunan tahun 2023 masih sama dengan tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

##### A. Tema Pembangunan

Tema RKP Kabupaten Banjar tahun 2023, sebagai berikut :

**“ PEMANTAPAN PEMULIHAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA Penguatan Kehidupan Sosial Masyarakat ”**

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan tahun 2023 adalah

- Kesehatan, Pendidikan, dan Kewirausahaan
- Pertanian, Perikanan
- UMKM, Industri Pengolahan, dan Perdagangan/Jasa
- Banjir dan COVID

Selanjutnya indikator makro yang ditetapkan pada tahun 2023 dengan menyelaraskan target indikator makro Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Tabel Indikator Makro Tahun 2022

Indikator	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target Prov. Kalsel untuk Kab. Banjar	Target Nasional untuk Prov. Kalsel
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,91	4,3-4,7	2,50 – 3,00	4,0 - 4,5	5,4 – 6,0
Angka Pengangguran (%)	3,87	3,78	3,50 – 3,87	4,1 - 4,2	5,5 – 6,2
Angka Kemiskinan (%)	2,55	3,74	3,00 - 3,65		8,5 – 9,0
IPM	69,18	69,12	69,98 – 70,14	71,2 - 72,6	73,44 – 73,48
Indeks Gini		0,32	0,32	0,333	0,375-0380

Sumber Data : Pengolahan Tim RKPD dan Ranwal RKPD Prov. Kalsel dan Kickoff Ranwal RKP

##### B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023

Prioritas Pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara

khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Perumusan prioritas pembangunan disusun dengan memperhatikan :

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023.

Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020 2024 sebagai penerjemahan dari Visi Misi dan Arah Presiden sebagai berikut :

- a. Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang berkualitas
- b. Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan
- c. Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing
- d. Revolusi Mental dan Pemabngunan Kebudayaan
- e. Infrastruktur Untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- f. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- g. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Tema Nasional yang diusung pada RKP 2022 adalah : “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Tema tersebut dijabarkan melalui 7 Prioritas Nasional yang terdiri dari :

- 1). Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2). Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3). Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4). Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5). Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dengan Pelayanan dasar;
- 6). Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- 7). Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformai Pelayanan Publik.

2. Arah kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Ranwal RKPD Tahun 2022 adalah Memantapkan Daya Saing Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan lingkungan.

Tema tersebut dijabarkan melalui prioritas :

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian dan Pariwisata
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana
3. Memperkuat sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
5. Meningkatkan Kualitas dan daya Saing Sumber Daya Manusia
6. Kalsel sebagai Gerbang dari *Food Estate* dan Ibu Kota Negara Baru

3. Arah kebijakan Kabupaten Banjar yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah tahun 2022, antara lain :
- 1) Peningkatan keselarasan pengamalan agama, seni dan budaya;
  - 2) Peningkatan kapasitas lembaga zakat;
  - 3) Peningkatan transparansi melalui pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);
  - 4) Fasilitasi dan koordinasi ketatalaksanaan dan pelayanan public;
  - 5) Peningkatan sistem pelayanan perizinan (IKM Kecamatan);
  - 6) Peningkatan pencapaian indikator kinerja kunci tataran pengambil kebijakan;
  - 7) Peningkatan pencapaian indikator kinerja kunci tataran pelaksanaan kebijakan;
  - 8) Peningkatan Kualitas BUMD;
  - 9) Peningkatan koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah;
  - 10) Penyusunan dokumen informasi perekonomian daerah;
  - 11) Fasilitasi dan koordinasi lingkup perekonomian;
  - 12) Peningkatan kerjasama antar daerah;
  - 13) Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan hari-hari besar nasional;
  - 14) Peningkatan penyelesaian batas wilayah;
  - 15) Peningkatan fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah;
  - 16) Peningkatan Fasilitasi Bantuan Hukum;
  - 17) Fasilitasi dan koordinasi HAM;
  - 18) Asistensi *contract drafting*;
  - 19) Peningkatan fasilitas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat.

### **III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Visi, Misi dan Program Strategis yang merupakan komitmen yang harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) agar dapat diwujudkan secara konsisten selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran dengan memperhatikan Permasalahan Pembangunan Daerah serta Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar. Upaya mengelaborasi antara gagasan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan kondisi empiris permasalahan pembangunan dan Isu Strategis Daerah tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 ini merupakan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan umum, pelayanan publik dan daya saing di Kabupaten

Banjar. Berikut akan dibahas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 ini.

Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Banjar yang merepresentasikan atau menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah dapat diukur yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan kepala daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPJMD. Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Banjar adalah “Terselenggaranya Reformasi dalam perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja”. Sesuai dengan Misi ke 4 dan sasaran ke 3 pada dokumen RPJMD Kabupaten Banjar.

Sedangkan untuk sasaran pada Renja SKPD diambil dari pohon kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yaitu Nilai SAKIP.

### **III.3. Program dan Kegiatan**

#### **III.3.1. Rincian Program dan Kegiatan**

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar adalah Program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2023.

Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas ini Dokumen RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2023. Jumlah Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar di tahun 2022 berjumlah 2 program 14 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar untuk tahun 2023 yang merupakan sasaran pada RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 dengan rincian adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan :
  - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
    3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan :
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Pengadaan Mebel
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  2. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- h) Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah, Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
  2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
  3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- i) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sub Kegiatan :
1. Fasilitasi Keprotokolan
  2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
  3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- j). Penataan Organisasi, Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
  2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
  3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- 2) Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan :
- a). Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Sub Kegiatan :
    1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
    2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
  - b). Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, Sub Kegiatan :
    1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
    2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
  - c). Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Sub Kegiatan :
    1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
    3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
  - d). Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Sub Kegiatan :
    1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
    2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
    3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

### **III.3.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan, adalah sebagai berikut :

- a) Pencapaian RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2023;
- b) Pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
- c) Pencapaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
- d) Pencapaian fasilitasi dan administrasi penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

### **III.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023, antara lain meliputi :

- 1) Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan adalah 3 (Tiga) program dengan total kegiatan sebanyak 19 kegiatan; serta sub kegiatan sebanyak 56 sub kegiatan. Sedangkan Jumlah Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar di tahun 2023 berjumlah 2 program 15 kegiatan dan 46

sub kegiatan.

- 2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan adalah diluar wilayah dan dalam wilayah Kabupaten Banjar mencakup Kecamatan dan Kelurahan dan Sekretariat Daerah itu sendiri;
- 3) Total kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk pelaksanaan 2 Program dan 15 Kegiatan serta 46 Sub Kegiatan Strategis ini adalah sebesar Rp. **Rp. 35.094.597.065,00**. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.3.1 yang berisi daftar program dan kegiatan prioritas, yaitu Program Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 di bawah ini :

Tabel 3.3.1. di bawah ini berisi daftar usulan program dan kegiatan prioritas, yaitu Program Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023.

Tabel 3.3.1										
Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Banjar										
Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*		
	SEKRETARIAT DAERAH				Rp. 35.094.597.065,00	APBD			Rp. 53.244.665.642	
4	1	1								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 34.053.985.266,00	APBD		100 persen	Rp. 50.173.371.514
			Nilai SAKIP	Kab.Banjar	72,5 Nilai				72,5 Nilai	
			Nilai IKM Kab. Banjar	Kab.Banjar	85 Nilai				85 Nilai	
			Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Kab.Banjar	85 Nilai				85 Nilai	
4	1	1	2.01							
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Kab.Banjar	81,75 Nilai	Rp. 202.894.800,00	APBD		81,75 Nilai	Rp. 368.199.168
			Persentase Perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
			Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang akuntabel	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
			Persentase Bagian yang berkinerja baik	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	

4	1	1	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	14 Dokumen	Rp. 105.814.800,00	APBD		14 Dokumen	Rp. 232.599.168
4	1	1	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Banjar	4 Laporan	Rp. 48.555.000	APBD		4 Laporan	Rp. 100.600.000
4	1	1	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Banjar	29 Laporan	Rp. 48.525.000	APBD		29 Laporan	Rp. 35.000.000
4	1	1	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 16.307.640.224,00	APBD		100 Persen	Rp. 18.864.100.000
4	1	1	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Banjar	117 Orang	Rp. 16.052.856.224	APBD		117 Orang	Rp. 18.742.500.000
4	1	1	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Banjar	12 Dokumen	Rp. 254.784.000	APBD		12 Dokumen	Rp. 121.600.000
4	1	1	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 168.761.000	APBD		100 persen	Rp. 520.477.000
						Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlayani		100 persen				100 persen	

4	1	2.05	10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Banjar	80 Orang	Rp. 18.761.000	APBD		80 Orang	Rp. 120.477.000
4	1	2.05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Banjar	25 Orang	Rp. 150.000.000	APBD		25 Orang	Rp. 400.000.000
4	1	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlayani	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 2.936.917.875	APBD		100 persen	Rp. 5.166.652.646
4	1	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Banjar	6 Paket	Rp. 33.942.000	APBD		6 Paket	Rp. 45.176.802
4	1	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Banjar	14 Paket	Rp. 612.165.875	APBD		14 Paket	Rp. 593.524.844
4	1	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Banjar	4 Laporan	Rp. 30.000.000	APBD		4 Laporan	Rp. 27.951.000
4	1	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Banjar	2 Laporan	Rp. 2.260.810.000	APBD		2 Laporan	Rp. 4.500.000.000
4	1	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 85.212.000	APBD		100 persen	Rp. 5.201.407.450
4	1	2.07	01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Kab.Banjar	1 Unit	Rp.	APBD		1 Unit	Rp. 1.933.011.300

						Disediakan							
4		1	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab.Banjar	4 Paket	Rp. 85.212.000	APBD		4 Paket	Rp. 268.396.150
4		1	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab.Banjar	3 Unit	Rp.	APBD		3 Unit	Rp. 3.000.000.000
4		1	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 5.172.769.196	APBD		100 persen	Rp. 6.425.241.822
4		1	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Banjar	2 Laporan	Rp. 43.039.900	APBD		2 Laporan	Rp. 100.000.000
4		1	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Banjar	12 Laporan	Rp. 1.109.999.296	APBD		12 Laporan	Rp. 1.577.022.040
4		1	2.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Banjar	2 Laporan	Rp. 207.250.000	APBD		2 Laporan	Rp. 275.849.750
4		1	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Banjar	4 Laporan	Rp. 3.812.480.000	APBD		4 Laporan	Rp. 4.472.370.032
4		1	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 3.733.718.725	APBD		100 persen	Rp. 4.166.256.270

4		1	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Banjar	38 Unit	Rp. 1.037.120.000	APBD		38 Unit	Rp. 934.362.000
4		1	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Banjar	121 Unit	Rp. 1.209.160.000	APBD		121 Unit	Rp. 2.130.997.550
4		1	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Banjar	16 Unit	Rp. 40.000.000	APBD		16 Unit	Rp. 66.550.000
4		1	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Banjar	6 Unit	Rp. 544.174.725	APBD		6 Unit	Rp. 139.755.000
4		1	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Banjar	6 Unit	Rp. 479.964.000	APBD		6 Unit	Rp. 472.505.000
4		1	2.09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Banjar	250 Unit	Rp. 423.300.000	APBD		250 Unit	Rp. 422.086.720
4		1	2.11		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 963.174.556	APBD		100 persen	Rp. 1.070.173.700
						Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang sesuai ketentuan	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	

						Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi	Kab.Banjjar	100 persen				100 persen	
						Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kab.Banjjar	100 persen				100 persen	
4		1	2.11	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Banjjar	24 Orang/Bulan	Rp. 170.474.556	APBD		24 Orang/Bulan	Rp. 227.000.000
4		1	2.11	02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab.Banjjar	9 Paket	Rp. 102.700.000	APBD		9 Paket	Rp. 123.383.700
4		1	2.11	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Banjjar	6 Orang	Rp. 90.000.000	APBD		6 Orang	Rp. 119.790.000
4		1	2.11	04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Banjjar	24 Orang/Bulan	Rp. 600.000.000	APBD		24 Orang/Bulan	Rp. 600.000.000
4		1	2.12		Kegiatan Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan KDH yang sesuai ketentuan	Kab.Banjjar	100 persen	Rp. 1.953.895.190	APBD		100 persen	Rp. 3.799.583.872
						Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan WKDH		100 persen				100 persen	

						yang sesuai ketentuan							
						Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah yang sesuai ketentuan		100 persen				100 persen	
4		1	2.12	01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab.Banjar	7 Paket	Rp. 655.880.250	APBD		7 Paket	Rp. 805.261.921
4		1	2.12	02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab.Banjar	6 Paket	Rp. 361.333.000	APBD		6 Paket	Rp. 480.950.994
4		1	2.12	03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab.Banjar	17 Paket	Rp. 936.681.940	APBD		17 Paket	Rp. 2.513.370.957
4		1	2.13		Kegiatan Penataan Organisasi	Tingkat efesiensi unit dan prestasi kerja unit Kab. Banjar bernilai Baik	Kab.Banjar	1,3 Skor/Nilai	Rp. 870.574.200	APBD		1,3 Skor/Nilai	Rp. 1.480.288.227
						Persentase pengelolaan tatalaksana	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
						Persentase PD yang pelayanan publik bernilai Baik	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
						Persentase PD pengelolaan RB bernilai Baik	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
						Persentase PD SAKIP bernilai Baik	Kab.Banjar	100 persen				100 persen	
4		1	2.13	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan	Kab.Banjar	9 Dokumen	Rp. 341.090.000	APBD		9 Dokumen	Rp. 168.680.050

						Kelembagaan dan Analisis Jabatan							
4		1	2.13	02	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab.Banjar	6 Laporan	Rp. 208.241.200	APBD		6 Laporan	Rp. 228.253.916
4		1	2.13	03	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab.Banjar	7 Dokumen	Rp. 321.243.000	APBD		7 Dokumen	Rp. 1.083.354.261
4		1	2.14		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas keprotokolan kepada Pimpinan yang dilaksanakan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 1.658.427.500	APBD		100 Persen	Rp. 3.110.991.359
						Persentase Fasilitas Komunikasi Pimpinan yang diselesaikan	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
						Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang diselesaikan	Kab.Banjar	100 Persen				100 Persen	
4		1	2.14	01	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Kab.Banjar	12 Laporan	Rp. 1.395.000.000	APBD		12 Laporan	Rp. 2.109.787.460
4		1	2.14	03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab.Banjar	1 Laporan	Rp. 132.886.000	APBD		1 Laporan	Rp. 449.499.680
4		1	2.14	02	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Kab.Banjar	12 Laporan	Rp. 130.541.500	APBD		12 Laporan	Rp. 551.704.219
4		3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 1.040.611.799	APBD		100 Persen	Rp. 3.071.294.128

						Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kab.Banjar	50 skor/nilai				50 skor/nilai	
4		3	2.01			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 351.578.200	APBD		100 persen	Rp. 650.000.000
4		3	2.01	01		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab.Banjar	13 Dokumen	Rp. 310.684.500	APBD		13 Dokumen	Rp. 450.000.000
4		3	2.01	02		Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab.Banjar	4 Laporan	Rp. 40.893.700	APBD		4 Laporan	Rp. 200.000.000
4		3	2.02			Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 120.130.899	APBD		100 Persen	Rp. 646.294.128
4		3	2.02	01		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab.Banjar	4 Dokumen	Rp. 43.654.300	APBD		4 Dokumen	Rp. 330.694.128
4		3	2.02	02		Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab.Banjar	4 Laporan	Rp. 38.745.200,00	APBD		4 Laporan	Rp. 93.600.000
4		3	2.02	03		Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab.Banjar	2 Laporan	Rp. 37.731.399	APBD		2 Laporan	Rp. 222.000.000

4		3	2.03		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Kriteria Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik	Kab.Banjar	40 Persen	Rp. 529.310.700	APBD		40 Persen	Rp. 1.700.000.000
4		3	2.03	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Banjar	5 Dokumen	Rp. 129.242.000	APBD		5 Dokumen	Rp. 300.000.000
4		3	2.03	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab.Banjar	5 Dokumen	Rp. 268.033.700	APBD		5 Dokumen	Rp. 900.000.000
4		3	2.03	03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Banjar	68 Orang	Rp. 132.035.000	APBD		68 Orang	Rp. 500.000.000
4		3	2.04		Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan kebijakan Sumber daya alam	Kab.Banjar	98 Laporan	Rp. 39.592.000	APBD		98 Laporan	Rp. 75.000.000
4		3	2.04	01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab.Banjar	2 Dokumen	Rp. 14.933.000	APBD		2 Dokumen	Rp. 35.000.000
4		3	2.04	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Kab.Banjar	96 Dokumen	Rp. 24.659.000	APBD		96 Dokumen	Rp. 45.000.000

						Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan								
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah dan RPJMD Kabupaten Banjar.

Jumlah seluruh program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah di tahun 2023 adalah sebanyak 3 program 19 kegiatan 56 sub kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan serta sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 37.250.051.045,00. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 dibawah ini berisi daftar Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten

Tabel 4.1													
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Banjar													
Kode					Usuran/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	
					SEKRETARIAT DAERAH				Rp. 37.250.051.045,00	APBD		Rp. 53.244.665.642	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Kab.Banjar	85 Nilai	Rp. 34.053.985.266,00	APBD		85 Nilai	Rp. 50.173.371.514
4	1	1	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Kab.Banjar	85 Persen	Rp. 202.894.800,00	APBD		85 Persen	Rp. 368.199.168
4	1	1	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banjar	14 Dokumen	Rp. 105.814.800,00	APBD		14 Dokumen	Rp. 232.599.168
4	1	1	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Banjar	4 Laporan	Rp. 48.555.000	APBD		4 Laporan	Rp. 100.600.000
4	1	1	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Banjar	29 Laporan	Rp. 48.525.000	APBD		29 Laporan	Rp. 35.000.000

4	1	1	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 16.307.640.224,00	APBD		100 Persen	Rp. 18.864.100.000
4	1	1	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Banjar	117 Orang	Rp. 16.052.856.224	APBD		117 Orang	Rp. 18.742.500.000
4	1	1	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Banjar	12 Dokumen	Rp. 254.784.000	APBD		12 Dokumen	Rp. 121.600.000
4	1	1	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Kab.Banjar	85 persen	Rp. 168.761.000	APBD		100 persen	Rp. 520.477.000
4	1	1	2.05	10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Banjar	80 Orang	Rp. 18.761.000	APBD		80 Orang	Rp. 120.477.000
4	1	1	2.05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Banjar	25 Orang	Rp. 150.000.000	APBD		25 Orang	Rp. 400.000.000
4	1	1	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 2.936.917.875	APBD		100 persen	Rp. 5.166.652.646
4	1	1	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Banjar	1 Paket	Rp. 33.942.000	APBD		1 Paket	Rp. 45.176.802
4	1	1	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Banjar	14 Paket	Rp. 612.165.875	APBD		14 Paket	Rp. 593.524.844
4	1	1	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab.Banjar	4 Laporan	Rp. 30.000.000	APBD		4 Laporan	Rp. 27.951.000

4	1	1	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Banjar	2 Laporan	Rp. 2.260.810.000	APBD		2 Laporan	Rp. 4.500.000.000
4	1	1	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 85.212.000	APBD		100 persen	Rp. 5.201.407.450
4	1	1	2.07	01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab.Banjar	1 Unit	Rp.	APBD		1 Unit	Rp. 1.933.011.300
4	1	1	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab.Banjar	4 Paket	Rp. 85.212.000	APBD		4 Paket	Rp. 268.396.150
4	1	1	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab.Banjar	3 Unit	Rp.	APBD		3 Unit	Rp. 3.000.000.000
4	1	1	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 5.172.769.196	APBD		100 persen	Rp. 6.425.241.822
4	1	1	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Banjar	2 Laporan	Rp. 43.039.900	APBD		2 Laporan	Rp. 100.000.000
4	1	1	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Banjar	12 Laporan	Rp. 1.109.999.296	APBD		12 Laporan	Rp. 1.577.022.040
4	1	1	2.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Banjar	2 Laporan	Rp. 207.250.000	APBD		2 Laporan	Rp. 275.849.750

4	1	1	2 0 8	0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Banjar	4 Laporan	Rp. 3.812.480.000	APBD		4 Laporan	Rp. 4.472.370.032
4	1	1	2 0 9		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Kab.Banjar	100 persen	Rp. 3.733.718.725	APBD		100 persen	Rp. 4.166.256.270
4	1	1	2 0 9	0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Banjar	38 Unit	Rp. 1.037.120.000	APBD		38 Unit	Rp. 934.362.000
4	1	1	2. 09	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Banjar	121 Unit	Rp. 1.209.160.000	APBD		121 Unit	Rp. 2.130.997.550
4	1	1	2. 09	0 6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Banjar	16 Unit	Rp. 40.000.000	APBD		16 Unit	Rp. 66.550.000
4	1	1	2. 09	0 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Banjar	6 Unit	Rp. 544.174.725	APBD		6 Unit	Rp. 139.755.000
4	1	1	2. 09	1 0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Banjar	6 Unit	Rp. 479.964.000	APBD		6 Unit	Rp. 472.505.000

4	1	1	2.09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Banjar	250 Unit	Rp. 423.300.000	APBD		250 Unit	Rp. 422.086.720
4	1	1	2.11		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Kab.Banjar	85 persen	Rp. 963.174.556	APBD		100 persen	Rp. 1.070.173.700
4	1	1	2.11	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Banjar	24 Orang/Bulan	Rp. 170.474.556	APBD		24 Orang/Bulan	Rp. 227.000.000
4	1	1	2.11	02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab.Banjar	9 Paket	Rp. 102.700.000	APBD		9 Paket	Rp. 123.383.700
4	1	1	2.11	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Banjar	6 Orang	Rp. 90.000.000	APBD		6 Orang	Rp. 119.790.000
4	1	1	2.11	04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab.Banjar	24 Orang/Bulan	Rp. 600.000.000	APBD		24 Orang/Bulan	Rp. 600.000.000
4	1	1	2.12		Kegiatan Fasilitas Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Kab.Banjar	85 persen	Rp. 1.953.895.190	APBD		100 persen	Rp. 3.799.583.872
4	1	1	2.12	01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab.Banjar	7 Paket	Rp. 655.880.250	APBD		7 Paket	Rp. 805.261.921

4	1	1	2.12	02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab.Banjar	6 Paket	Rp. 361.333.000	APBD		6 Paket	Rp. 480.950.994
4	1	1	2.12	03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab.Banjar	17 Paket	Rp. 936.681.940	APBD		17 Paket	Rp. 2.513.370.957
4	1	1	2.13		Kegiatan Penataan Organisasi	Nilai IKM Kabupaten Banjar	Kab.Banjar	85 Nilai	Rp. 870.574.200	APBD		1,3 Skor/Nilai	Rp. 1.480.288.227
						Nilai SAKIP	Kab.Banjar	72.5 Nilai				100 persen	
4	1	1	2.13	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab.Banjar	4 Dokumen	Rp. 341.090.000	APBD		9 Dokumen	Rp. 168.680.050
4	1	1	2.13	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab.Banjar	6 Laporan	Rp. 208.241.200	APBD		6 Laporan	Rp. 228.253.916
4	1	1	2.13	03	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab.Banjar	7 Dokumen	Rp. 321.243.000	APBD		7 Dokumen	Rp. 1.083.354.261
4	1	1	2.14		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Kab.Banjar	85 Persen	Rp. 1.658.427.500	APBD		100 Persen	Rp. 3.110.991.359
4	1	1	2.14	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab.Banjar	12 Laporan	Rp. 1.395.000.000	APBD		12 Laporan	Rp. 2.109.787.460

4	1	1	2. 1 4	0 3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab.Banjar	1 Laporan	Rp. 132.886.000	APBD		1 Laporan	Rp. 449.499.680
4	1	1	2. 1 4	0 2	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab.Banjar	12 Laporan	Rp. 130.541.500	APBD		12 Laporan	Rp. 551.704.219
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	Kab.Banjar	3,1110 Nilai	Rp. 2.155.453.980			3,1110 Nilai	Rp. 11.891.336.089
4	1	2	2. 0 1		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD	Kab.Banjar	3,1110 Nilai	Rp. 434.747.000,00	APBD		3,1110 Nilai	Rp. 677.104.441
4	1	2	2. 0 1	0 1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab.Banjar	4 Dokumen	Rp. 69.225.500,00	APBD		4 Dokumen	Rp. 66.144.045
4	1	2	2. 0 1	0 2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab.Banjar	4 Dokumen	Rp. 184.132.500,00	APBD		4 Dokumen	Rp. 464.785.015
4	1	2	2. 0 1	0 3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab.Banjar	5 Dokumen	Rp. 181.389.000,00	APBD		100 Persen	Rp. 146.175.381
4	1	2	2. 0 2		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 1.380.579.780,00	APBD		100 Persen	Rp. 10.179.083.500
4	1	2	2. 0 2	0 1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab.Banjar	8 Dokumen	Rp. 1.195.858.000,00	APBD		8 Dokumen	Rp. 6.413.000.000
4	1	2	2. 0 2	0 2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi,	Kab.Banjar	3 Dokumen	Rp. 94.905.000,00	APBD		3 Dokumen	Rp. 1.266.083.500

						Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB							
4	1	2	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab.Banjar	4 Dokumen	Rp. 89.816.780,00	APBD		4 Dokumen	Rp. 2.500.000.000
4	1	2	2.03		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Kab.Banjar	100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 314.568.400,00	APBD		100 Persen 100 Persen 100 Persen	Rp. 1.004.222.000
4	1	2	2.03	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab.Banjar	550 Dokumen	Rp. 105.869.800,00	APBD		550 Dokumen	Rp. 365.917.600
4	1	2	2.03	02	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab.Banjar	5 Kasus	Rp. 171.905.000,00	APBD		5 Kasus	Rp. 413.906.800
4	1	2	2.03	03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab.Banjar	500 Dokumen	Rp. 36.793.600,00	APBD		500 Dokumen	Rp. 224.397.600

4	1	2	2.04		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 25.558.800	APBD		100 Persen	Rp. 30.926.148
4	1	2	2.04	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab.Banjar	1 Dokumen	Rp. 25.558.800,00	APBD		1 Dokumen	Rp. 30.926.148
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 1.040.611.799	APBD		100 Persen	Rp. 3.071.294.128
4	1	3	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 351.578.200	APBD		100 persen	Rp. 650.000.000
4	1	3	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab.Banjar	13 Dokumen	Rp. 310.684.500	APBD		13 Dokumen	Rp. 450.000.000
4	1	3	2.01	02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab.Banjar	4 Laporan	Rp. 40.893.700	APBD		4 Laporan	Rp. 200.000.000
4	1	3	2.02		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	Kab.Banjar	100 Persen	Rp. 120.130.899	APBD		100 Persen	Rp. 646.294.128

4	1	3	2.02	01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab.Banjar	4 Dokumen	Rp. 43.654.300	APBD		4 Dokumen	Rp. 330.694.128
4	1	3	2.02	02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab.Banjar	4 Laporan	Rp. 38.745.200,00	APBD		4 Laporan	Rp. 93.600.000
4	1	3	2.02	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab.Banjar	2 Laporan	Rp. 37.731.399	APBD		2 Laporan	Rp. 222.000.000
4	1	3	2.03		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Kab.Banjar	40 Persen	Rp. 529.310.700	APBD		40 Persen	Rp. 1.700.000.000
4	1	3	2.03	01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Banjar	5 Dokumen	Rp. 129.242.000	APBD		5 Dokumen	Rp. 300.000.000
4	1	3	2.03	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab.Banjar	5 Dokumen	Rp. 268.033.700	APBD		5 Dokumen	Rp. 900.000.000
4	1	3	2.03	03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Banjar	68 Orang	Rp. 132.035.000	APBD		68 Orang	Rp. 500.000.000
4	1	3	2.04		Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan	Kab.Banjar	98 Laporan	Rp. 39.592.000	APBD		98 Laporan	Rp. 75.000.000

						Perekonomian Dan Pembangunan							
4	1	3	2.04	01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab. Banjar	2 Dokumen	Rp. 14.933.000	APBD		2 Dokumen	Rp. 35.000.000
4	1	3	2.04	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab. Banjar	96 Dokumen	Rp. 24.659.000	APBD		96 Dokumen	Rp. 45.000.000

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang disusun oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, Indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Renja Sekretariat Daerah ini juga merupakan dasar acuan dalam mengevaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Harapan lainnya adalah agar semua unsur dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar dapat menjadi tim kerja yang terintegrasi, bersinergi dan sistematis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga terjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan namun lebih dari itu diharapkan dapat bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan perubahan yang terus terjadi, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
- 2) Dalam hal rencana kerja tahun 2023 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang berpengaruh terhadap sasaran, kebutuhan keuangan daerah serta program dan kegiatan, maka dapat dilakukan penyesuaian Renja melalui penyusunan Perubahan Renja yang menjadi landasan penyusunan Perubahan RKA Tahun 2023.

Diharapkan Rencana Kerja ini dijadikan sebagai pedoman rencana operasional oleh bagian-bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, diharapkan pencapaian tujuan harus tetap memperhatikan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya pada masing-masing bagian sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai target waktu dan volume yang telah ditetapkan.

Dalam hal ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Sekretariat Daerah dapat dicapai. Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat.

Saat penjabaran Rencana Kerja ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya. Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2023 ini disusun. Semoga Allah SWT selalu meridhai semua langkah kita menuju Kabupaten Banjar yang MANIS (*Maju, Mandiri dan Agamis*).

Martapura, Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. H. Mokhamad Hilman, ST, MT

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19700328 199503 1 001